RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026, PENDAPAT DAN KATA AKHIR FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kebumen menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Sikap tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kedua Raperda diperlukan untuk memberikan landasan bagi pengembangan potensi ekonomi kreatif sekaligus memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Kebumen.

Terhadap Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Fraksi PKB menilai sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mendorong diversifikasi perekonomian daerah berbasis kreativitas, inovasi, dan kekayaan intelektual sekaligus melestarikan budaya dan kearifan lokal. Fraksi menilai Raperda ini juga menjawab keresahan pelaku industri kreatif yang selama ini dinilai masih minim perhatian, pembinaan, dan dorongan Pemerintah Daerah. Fraksi mendukung penguatan perlindungan kekayaan intelektual, pelatihan dan pendampingan teknis, fasilitasi teknologi, serta standardisasi dan sertifikasi profesi. Namun, program pengembangan diminta menjangkau pelaku usaha hingga desa dan pelosok, dilaksanakan secara konsisten dan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial tahunan, serta menyediakan skema subsidi sertifikasi bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Penetapan klaster prioritas ekonomi kreatif juga diharapkan tidak menyebabkan klaster lainnya terabaikan.

Terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Fraksi PKB mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pelaksanaan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pandangan anak, dan tata kelola pemerintahan yang baik diminta benar-benar diterapkan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Fraksi menekankan pencegahan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran anak serta meminta Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan paling lambat satu tahun sejak Perda diundangkan dengan dukungan anggaran dan kelembagaan yang memadai. Fraksi berharap keberhasilan kebijakan ini tercermin dalam kondisi nyata berupa menurunnya angka anak putus sekolah, kekerasan seksual terhadap anak, perkawinan anak, dan penelantaran anak, bukan hanya dalam data statistik atau pencapaian administratif Kabupaten Layak Anak.

Catatan: Pendapat dan Kata Akhir Fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada 2 September 2026. Dokumen ditandatangani oleh Solichudin selaku Ketua Fraksi PKB dan Saiful Anwar selaku Sekretaris Fraksi.

Kata Kunci: Fraksi PKB; DPRD Kabupaten Kebumen; Pendapat dan Kata Akhir Fraksi; Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pelaku Ekonomi Kreatif; Kekayaan Intelektual; Kabupaten Layak Anak; Perlindungan Anak; Hak Anak; Rancangan Peraturan Daerah.

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026, FINAL OPINION OF THE NATIONAL AWAKENING PARTY FACTION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY ON THE DRAFT REGIONAL REGULATIONS CONCERNING CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT AND THE IMPLEMENTATION OF A CHILD-FRIENDLY REGENCY.

The National Awakening Party (PKB) Faction of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency accepted the Draft Regional Regulation concerning Creative Economy Development and the Draft Regional Regulation concerning the Implementation of a Child-Friendly Regency. The faction considered both regulations necessary to provide a foundation for developing the potential of the creative economy while strengthening the fulfillment of children's rights and child protection in Kebumen Regency.

Regarding Creative Economy Development, the PKB Faction considers the creative economy to have significant potential to diversify the regional economy through creativity, innovation, and intellectual property while preserving local culture and wisdom. The faction supports stronger intellectual property protection, training and technical assistance, technology facilitation, and professional standardization and certification. It emphasizes that development programs should reach businesses in villages and remote areas, be implemented consistently rather than merely as annual ceremonial activities, and provide certification subsidies for MSMEs facing financial constraints. Prioritization of particular creative economy clusters should also not result in other clusters being neglected.

Regarding the Implementation of a Child-Friendly Regency, the PKB Faction supports the planned, comprehensive, and sustainable fulfillment of children's rights and special protection. The principles of non-discrimination, the best interests of the child, respect for children's views, and good governance should be implemented down to the subdistrict, village, and urban village levels. The faction emphasizes the prevention of violence, discrimination, exploitation, and neglect of children and calls on the Regional Government to issue the implementing Regent Regulation no later than one year after the Regional Regulation is promulgated, supported by adequate funding and institutional capacity. The faction expects the policy to produce tangible improvements, including reductions in school dropout, sexual violence against children, child marriage, and child neglect, rather than merely improvements in statistical or administrative indicators.

***Note**: The Final Opinion of the Faction was delivered at a Plenary Meeting of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency on 2 September 2026.*

The document was signed by Solichudin, as Chair of the PKB Faction, and Saiful Anwar, as Secretary.

Keywords: *PKB Faction; Kebumen Regency DPRD; Final Faction Opinion; Creative Economy Development; Creative Economy Actors; Intellectual Property; Child-Friendly Regency; Child Protection; Children's Rights; Draft Regional Regulation.*